

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa transportasi adalah salah satu kebutuhan masyarakat untuk mobilitas untuk melakukan keberlangsungan hidup sekaligus kebutuhan masyarakat dalam transportasi. Sarana transportasi tidak bisa terpisahkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sangat membutuhkan transportasi untuk aktivitas dan keperluannya. Dalam memenuhi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan adanya transportasi umum agar memudahkan mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini transportasi umum merupakan kebutuhan publik. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, disebutkan juga dalam Pasal 6 ayat 4 bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan harus memberikan pembinaan, pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan perizinan kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten atau kota. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Kota Bogor dijuluki sebagai “Kota Sejuta Angkutan Kota” memiliki jumlah transportasi umum untuk mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Global Traffic Score pada tahun 2021, menunjukkan bahwa Kota Bogor menduduki peringkat kelima sebagai kota termacet di Indonesia dan peringkat ke-821 di dunia (ADRI, 2022). Dengan ini

pemerintah Kota Bogor mengambil peran penting dalam pengadaan mobilitas masyarakat terkait dengan fasilitas transportasi umum..

Keberhasilan pelayanan publik dalam transportasi bisa dilihat melalui kemampuan untuk memenuhi serta memajukan ekonomi negara, daerah , dan komunitas. Selain itu, faktor sosial budaya juga dapat diukur dengan berbagai indikator transportasi, antara lain kapasitas jalan, pelayanan, aksesibilitas, dan aspek lainnya. Kebutuhan dalam transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*), dimana pergerakan yang terjadi dikarenakan adanya pergerakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat beda tempat lokasi aktivitas. Dengan demikian, sistem tata guna lahan (*land use*) tidak bisa terpisahkan dalam perencanaan transportasi.

Umtuk menindaklanjuti permasalahan lalu lintas dan kesediaan angkutan perkotaan yang mumpuni, pemerintah Kota Bogor dengan dibersamai oleh pemerintah pusat mewujudkan Kota yang bebas dari kemacetan yang terjadi, dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementrian Perhubungan untuk pengembangan trasnportasi massal di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi).

Pemerintah Kota Bogor membuat sebuah kebijakan trasnportasi umum di bersamai oleh BPTJ, yang telah menyediakan moda transportasi Bus Rapid Transit (BRT) yang menggantikan angkutan kota konvensional, sebanyak tiga angkot di konvensional menjadi satu bus, dengan melalui dua langkah, yaitu menghancurkan kendaraan yang sudah tidak layak atau mempelat hitamkan unit kendaraan yang masih layak jalan. Pengemudi angkot akan direkrut dan diberi pembekalan

pelatihan dengan syarat tidak lebih dari 50 tahun, memiliki SIM dan pendidikan minimal SMA. Dengan hal ini pemerintah berinisiatif untuk membantu mereka dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak (Susanti, 2021). Perluasan lapangan kerja ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan mengingat tentang kompleksnya masalah ketenaga kerjaan, mulai dari meningkatnya jumlah angkatan kerja, pengangguran, penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, meningkatnya mobilitas penduduk usia produktif sampai rendahnya kualitas tenaga kerja.

Dengan pengoperasian BRT diharapkan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan angkot, sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bogor. Pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang salah satunya dikenal dengan BRT Di Kota-kota besar Di Indonesia sudah diterapkan di berbagai daerah termasuk di Kota Bogor. Kota Bogor terpilih sebagai pilot project subsidi, pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pembenahan dalam transportasi perkotaan. Hal ini dapat memberikan pelayanan terbaik dan menjadi pilihan cerdas masyarakat Kota Bogor untuk bermobilitas.

Lebih dalam lagi BisKita merupakan produk kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dengan dasar hukum Perda Nomor 40 tahun 2016 tentang pelayanan minimal angkutan massal di Kota Bogor, yang kemudian ditanggungan jawabkan kepada BUMD Trans Pakuan Bogor. Uniknya Trans Pakuan Bogor sebagai penanggung jawabnya BisKita yang baru ada pada tahun 2022 Perda nomor 3 tahun 2022 tentang, Perusahaan umum daerah transportasi pakuan Kota Bogor. Keberlangsungan Biskita sebagai program kolaborasi antara pemerintah daerah Kota Bogor dan kementrian Perhubungan, juga didasari dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, dengan mewujudkan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jumlah BisKita Trans Pakuan Bogor hampir menjangkau seluruh daerah-daerah di Kota Bogor. Dengan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilisasi. Dalam jumlah trayek yang sudah mencakupi seluruh daerah Kota Bogor memudahkan masyarakat untuk beraktifitas. Dengan berkerja sama dengan PT. Kodjari Tata yang telah mempunyai pengalaman dalam hal transportasi membuat pelayanan dan sistem manajemen bisa diatasi karena dapat diketahui perusahaan tersebut sudah lama berkecembung dalam transportasi di Indonesia. Pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sangat memuaskan dan sudah standar oprasional yang sesuai. Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kehadiran BisKita Trans Pakuan hadir sebagai pelayanan angkutan umum massal dengan konsep BRT di Kota Bogor, hal ini berupaya agar angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan yang diberikan lebih baik dibandingkan dengan angkutan konvensional, ini merupakan konsep acuan untuk standar pelayanan terhadap masyarakat dengan memenuhi beberapa aspek. Dengan berkerja sama oleh BPTJ. Dengan diresmikan pada tanggal 2 November 2021. Layanan yang disepakati bernama BISKITA TRANS PAKUAN, dengan adanya angkutan massal ini dengan konsep bus di Kota Bogor diharapkan masyarakat Kota Bogor lebih memilih menggunakan angkutan ini.

Tidak kesesuaian dengan jumlah kendaraan dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Sementara itu BisKita Trans Pakuan Kota Bogor tidak memiliki jalur khusus untuk beroperasi seperti bus Transjakarta di DKI Jakarta, hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di jalan, saat lampu merah atau sedang berada di halte terutama di beberapa titik penting, serta ruas jalan Kota Bogor tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada dan bentuk dari bus yang hampir menutupi satu jalur jalan dibandingkan dengan bentuk angkutan kota konvensional. BisKita Trans Pakuan dalam pengoprasianya tidak bisa lepas dari kemacetan yang terjadi di Kota Bogor karena hal ini tidak sebanding dengan luas jalan yang tersedia.

Melihat adanya beberapa faktor permasalahan dari kebijakan dalam angkutan massal BisKita Trans Pakuan Bogor, menuju kota yang bebas dari kemacetan di Kota Bogor, dengan menyeimbangi fasilitas dan kenyamanan pengguna transportasi ini menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk menelisik. Peneliti bertujuan untuk meneliti terkait berjalanya BisKita Trans Pakuan semenjak November 2021 serta bagaimana BisKita Trans Pakuan ini menjadi Transportasi utama menggantikan angkot (konvensional) yang sudah menjadi mobilitas masyarakat Kota Bogor.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Impelemntasi kebijakan BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian, yaitu :

1. Menganalisis implementasi Kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor di Kota Bogor
2. Menganalisis hambatan dalam implementasi kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor di Kota Bogor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti (pada khususnya) dan bagi para pembaca (pada umumnya). Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Civitas Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta diharapkan mampu memberikan kritik dan saran untuk Pemerintah Kota Bogor, dalam kebijakan Angkutan Kota BisKita Trans Pakuan Bogor menuju kota yang bebas dari kemacetan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan informasi tentang BisKita Trans Pakuan Bogor di Kota Bogor, terkait dengan pelayanan yang nantinya diharapkan membantu pengguna jasa maupun pihak terkait dalam mengembangkan transportasi angkutan umum kota lebih baik lagi.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan informasi tambahan terkait penelitian, juga membantu peneliti untuk memposisikan hasil penelitian dengan terori. Penelitian sebelumnya juga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk menambah prespektif lainnya terkait penelitian sejenis. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa literatur terkait penelitian yang dilakukan. Terdapat sejumlah penelitian yang juga dapat dijadikan rujukan dan materi penelitian peneliti antara lain:

Jurnal berjudul *“Implementasi Kebijakan Transportasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Angkutan Kota Di Kota Samarinda)”* yang ditulis oleh Andi Iswarah , Adam Idris, Nur Hasanah pada tahun 2018 membahas tentang Implementasi Kebijakan Transportasi dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Kota Samarinda. Yang menjadi latar belakang penelitian ini ialah langkah dalam perumusan kebijakan publik dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, keberlangsungan pelaksanaan kebijakan sudah optimal namun terkendala dalam kekurangan fasilitas untuk mendukung proses kebijakan ini. Persamaan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah membahas implementasi kebijakan guna meningkatkan fasilitas angkutan kota dalam menggantikan Angkutan kota (Angkot). Namun perbedaan terletak pada titik fokus yang lebih mendalam terhadap penelitian ini yaitu dengan kehadiran Biskita Trans Pakuan hadir sebagai pelayanan angkutan umum massal dengan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Bogor, hal ini berupaya agar angkutan umum massal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan lebih baik dibandingkan dengan angkutan konvensional, ini merupakan konsep acuan untuk standar

pelayanan terhadap masyarakat dengan memenuhi beberapa aspek. Dengan berkerjasama oleh BPTJ.

Jurnal yang berjudul “*Kebijakan Trans Pakuan Kota Bogor*” yang ditulis oleh Hanna Utami, Arianto, Dani Putra Sulistiawan, Tri Ainun Rohmah, Muhammad Ainul Yakin, dan Irfan Arif Kurniawan, pada tahun 2024. Membahas tentang keberjalanan kebijakan Trans Pakuan Kota Bogor dalam hal penggunaan transportasi untuk memobilisasi masyarakat di Kota Bogor menggunakan metode *literature review*. Latar belakang dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan yang bertambah dan tidak adanya perluasan jalan yang memadai, karena ada banyaknya transportasi umum di Kota Bogor, dalam kebijakan ini menerapkan kebijakan pelayanan angkutan umum yang berbasis *busway* akibat padatnya lalu lintas Kota Bogor. Hasil dari pembahasan ini, keberhasilan transportasi Trans Pakuan Bogor dalam hal pengguna serta mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Bogor. Persamaan pada penelitian ini yang diteliti oleh peneliti adalah membahas kebijakan Trans Pakuan Kota Bogor, agar mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi Trans Pakuan di Kota Bogor. Namun dalam penelitian ini, terdapat perbedaan mendalam pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perbedaan ini adalah keterlibatan aktor pemangku kebijakan serta penggunaan metode yang digunakan peneliti berbeda dengan penelitian yang digunakan, sehingga peneliti bisa mengembangkan pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor.

Jurnal yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Transportasi Umum di Kota Semarang Studi Kasus Perum DAMRI*” yang ditulis oleh Dinar Rizki Oktaviani, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si, pada tahun 2017. Membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tercapai berhasil atau sebaliknya, sehingga mampu dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan agar masyarakat bisa menggunakan transportasi ini yang bersifat *Bus Rapid Transit* (BRT). Yang menjadi latar belakang ini adalah penggunaan Bis Damri sebagai alat transportasi massal berbasis jalan BRT dalam pentingnya peran angkutan publik di Kota Semarang agar memenuhi mobilisasi. Persamaan dalam penelitian ini yang diteliti peneliti adalah membahas Implementasi Kebijakan Transportasi BRT dalam hal meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna transportasi yang diberikan oleh pemerintah. Dari pembahasan penelitian ini, ada perbedaan dalam hal keterlibatan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dalam mengambil peran melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemerintah Daerah terkait, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor yang diberikan kepada masyarakat pengguna dan mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Bogor.

Jurnal yang berjudul “*Implementasi Kebijakan transportasi Publik Bus Transjakarta (Busway) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan*” yang ditulis oleh Irvan Arif Kurniawan, pada Tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas terkait dengan implementasi kebijakan transportasi publik bus Transjakarta dalam hal mengurangi kemacetan yang di daerah DKI Jakarta, yang memberikan pelayanan berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna

transportasi ini, sehingga dapat meningkatkan pengguna dalam menggunakan transportasi bus Transjakarta dalam memenuhi kehidupan mobilisasi yang ada di DKI Jakarta. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas Implementasi Kebijakan transportasi dari hal pelayanan, serta meningkatkan transportasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar mengurangi kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang ada, serta juga dapat membahas kekurangan dan kelebihan dengan hadirnya transportasi ini. Dari penelitian ini terdapat perbedaan dalam hal penyediaan jalur khusus transjakarta sehingga dapat meningkatkan pengguna mobilisasi transportasi bus transjakarta, tetapi untuk BisKita tidak ada jalur khusus sehingga dapat mempengaruhi dengan pelayanan yang diberikan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Kebijakan Publik

Untuk mempermudah dalam menganalisa sebuah realitas kebijakan publik dalam daerah tertentu. Maka langkah awal yang harus diambil menggunakan pendekatan teori menurut para ahli. Kaitanya dengan hal apa yang ingin kita teliti. Dalam konteks ini, yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui definisi dari kebijakan publik yang berasal dari kata Publik Policy. Menurut Joko Santoso dalam (Taufiqurokhman, 2014) kebijakan publik mendapat perhatian yang dapat dirumuskan meliputi aktor dimana terlibat langsung dalam isu kebijakan, karena memiliki kepentingan dalam perubahan atau pembuatan kebijakan agar mempunyai tujuan yang diinginkan, dengan berkerjasama dengan aktor lain yang memiliki satu tujuan yang sama, serta memanfaatkan kelebihan setiap masing-masing aktor. Sedangkan menurut Mr.Sugiono bahwa kebijakan publik merupakan suatu usaha

yang di bersamai oleh warga masyarakat secara damai dan adil yang bersifat mengikat satu sama lain karena masyarakat sebagai konsumen yang merasakan baik apa buruknya sebuah kebijakan.

Di kuatkan oleh teori (Budiman, 1992) dalam kebijakan, kekuasaan negara bertemu dengan kedauatan yang didalamnya terdapat norma yang dipegang penuh oleh rakyat atau warga negaranya, karena dalam rezim negara yang saat ini mendominasi, hanya negara yang memiliki legitimasi untuk membuat sebuah kebijakan publik. Negara adalah pemegang kekuasaan penuh kekuasaan yang sah, karena pada dasarnya kebijakan publik adalah kebijakan negara, maka sering kali diartikan sebagai tindakan yang dimana dilakukan pemilik kekuasaan agar memastikan tujuan-tujuan yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh publik bisa tercapai (Purwo, 2004). Dalam hal ini negara memiliki kekuasaan penuh untuk membuat sebuah kebijakan publik, dalam hal membuat sebuah kebijakan memiliki tujuan dan keinginan yang dicapai agar tidak terjadinya kegagalan dalam sebuah negara. Kebijakan publik tidak asal dalam penerapannya, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sesuai dengan pendapat dari United Nation dalam buku (Sangkala, 2014) mengenai *best practice* yang meliputi dampak, kemitraan berkerja sama, keberlanjutan, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial, serta yang terakhir inovasi konteks lokal yang dapat diterima.

Ide utama dalam kebijakan memang terkait dengan sejumlah tindakan dalam hal ini Friedrich (Anderson 2000), yang diamana untuk memenuhi sejumlah apa yang di inginkan dan tujuan, walaupun diAdakui bahwa sebenrnya tidak mudah

terlibat untuk melihat apa yang di inginkan dan tujuan tindakan pemerintah. Hanya melalui pejabat-pejabat atau agen pemerintah, kebijakan publik dapat diketahui ke mana arahnya dalam hal ini, pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan agar memecahkan persoalan-soalan terkait permasalahan yang ada, tidak lepas juga dengan partisipasi masyarakat karena indikator keberhasilan sebuah kebijakan dilihat oleh kepuasan.

1.6.2. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008) menyimpulkan implementasi kebijakan publik sebagai sebuah hal tindakan dalam keputusan yang ada sebelumnya. Tindakan ini mencakupi usaha dan keputusan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun untuk melanjutkan usaha-usaha mencapai perubahan besar atau kecil yang ditetapkan pada keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Menurut Akib (Haedar, 2010), dalam studi implementasi kebijakan terbagi dalam tiga generasi yaitu, generasi pertama yang berfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dihasilkan atau tidak dilaksanakan. Generasi kedua berfokus pada keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Kemudian generasi ketiga berfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dan sebagai fokus yang kompleks sebagai proses dinamis.

Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari perspektif proses dan perspektif hasil. Dilihat dari perspektif proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat yang mencakup prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Apabila dilihat dari perspektif hasil, suatu kebijakan atau program yang dikatakan berhasil apabila program menghasilkan hasil akhir sesuai dengan tujuan. Suatu program mungkin dapat dikatakan berhasil dari perspektif proses namun belum tentu berhasil dari segi perspektif hasil, begitupun sebaliknya. Van Meter dan Van Horn juga mengembangkan model proses implelementasi kebijakan. Keduanya sepakat bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Van Meter dan Van Horn mengembangkan tipologi kebijakan yakni berdasarkan jumlah perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang di Kembangan oleh van meter dan van horn memiliki beberapa indikator untuk alat ukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran dan tujuan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Sikap kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi organisasi antar lembaga
6. Lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana keduanya berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.7. Oprasionalisasi Konsep

Sebuah implementasi kebijakan memerlukan indikator sebagai acuan untuk melihat keberhasilan pelaksanaannya. Pada hal ini, peneliti menggunakan teori Van meter dan Van Horn untuk menganalisa lebih dalam terkait kebijakan implementasi BisKita Trasn Pakuan Bogor. Terdapat beberapa indikator untuk menetnukan arah penelitian berdasarkan konsep teori Van Meter dan Van Horn.

1.7.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Konsep Van Meter dan Van Horn dilihat bedasarkan beberapa tindakan yang mendasari beberapa keputusan di dalam kebijakan. Dalam studi implementasi kebijakan melihat dari sudut pandang *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Sebab suatu kebijakan yang dikatakan berhasil apabila program menghasilkan hasil akhir sesuai dengan tujuan utama. Oleh karena itu peneliti menerapkan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn bedasarkan beberapa indikator seperti:

Teori implementasi kebijakan yang di Kembangan oleh van meter dan van horn memiliki beberapa indikator untuk alat ukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Permasalahan utama dari beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan berfungsi sebagai dasar dari variabel. Karena implementasi kebijakan tidak dapat berhasil atau gagal jika standar dan tujuan kebijakan yang diperhatikan. Maka variable ini akan mengatur sejauh mana standar dan tujuan kebijakan ini.

2. Sumber Daya.

Kemampuan dalam hal memperdaya sumber yang ada sangat penting untuk mencapai keberhasilan proses implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya utama dikarenakan menentukan sebuah pencapaian dalam proses implementasi. Dimulai dari awal sampai keberhasilan yang memenuhi menjadi berkualitas.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik menjadi badan pelaksana. Hal ini akan sangat penting karena karakteristik yang bersinergi agar agen pelaksana kebijakan berdampak signifikan terkait dengan kinerja yang baik. Misalnya, agen pelaksana diberikan peraturan yang sangat ketat dan sanksi yang diberikan ketika kebijakan publik diberlakukan bertujuan untuk mengubah perilaku kelompok atau individu secara fundamental. Dengan kata lain kebijakan publik dapat mempengaruhi perilaku fundamental manusia secara signifikan.

4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan pelaksana. Hal ini bisa saja terjadi karena kebijakan-kebijakan yang berlaku tidak melibatkan masyarakat setempat yang lebih memahami dengan apa yang menjadi permasalahan di lingkungannya. Tetapi kebijakan yang dibuat berasal dari atas (*top down*) sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi atau bahkan tidak mengetahui keinginan, kebutuhan, dan permasalahan di masyarakat.

5. Komunikasi Organisasi Antar Aktivitas Pelaksana.

Dalam hal implementasi kebijakan publik koordinasi sebuah cara yang potensial. Dapat diartikan sedikit kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu keberjalanan dalam mencapai pencapaian proses implementasi jika berkomunikasi dengan baik. Sebuah implementasi harus mempunyai tujuan dan dimensi yang berbeda. Semua pihak-pihak yang mengambil keputusan harus mengukur sebuah kebijakan sehingga dapat berfungsi dengan baik dan dapat dilaksanakan. Akibat dari proses komunikasi yang dibangun menjadi isu yang sangat dibutuhkan.

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah dalam mengevaluasi sebuah kinerja implementasi kebijakan serta mempertimbangkan

peran yang terjadi di lingkungan eksternal dalam menentukan berhasilnya kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak menguntungkan dapat disalahkan atas buruknya kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan eksternal yang aman.

Berdasarkan konsep tersebut penelitian ini melihat melalui dua faktor, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor.
2. Hambatan implementasi kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian sosial merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penemuan yang memungkinkan manusia untuk mempelajari banyak hal baru. Dalam pelaksanaannya, penelitian memerlukan pemikiran yang logis dan harus mengikuti aturan dengan teliti yang prosesnya dilakukan melalui penggabungan teori atau ide dengan fakta yang ada secara sistematis (Neuman, 2014). Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, Neuman (2014) memaparkan bahwa metode penelitian, merupakan serangkaian teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial, mengumpulkan dan menganalisis data, maupun melaporkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, fenomena sosial yang dibahas berkaitan dengan sudut pandang pengguna terhadap kualitas layanan dari BisKita.

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian dan menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti menjelaskan masalah dan hasil data analisis yang didapatkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan fakta penelitian. Di sisi lain, pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna secara individu maupun kelompok dalam menanggapi masalah sosial atau masalah manusia dengan menggunakan kerangka berpikir induktif (Creswell, 2009).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan elemen benda, individu maupun organisme, dimana hal tersebut merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk mendapatkan data penelitian, sumber informasi atau informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Bogor.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Angkutan Transportasi Jabodetabek.
3. Masyarakat Kota Bogor yang turut menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kota Bogor, karena Kota Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki beraneka macam angkutan kota, dengan pengadaan Biskita Trans Pakuan Kota Bogor. Program tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kemacetan dan fasilitas transportasi di Kota Bogor. Saat ini tingkat kemacetan di Kota Bogor masih belum bisa terselesaikan secara signifikan. Untuk itu pengadaan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor sangat menarik untuk diteliti.

1.8.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofand (Moleong, 2017), sumber data dalam suatu penelitian tipe kualitatif yakni berupa kata-kata, dan kalimat dan sebuah tindakan nyata. Selengkapnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya. Maka dari itu penelitian skripsi ini menggunakan 2 data yakni data primer dan data sekunder sehingga dapat memenuhi syarat untuk sebuah penelitian kualitatif deskriptif.

1. Data Primer

Data primer (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 2014) merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung. Data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini yang bersifat subjektif baik secara individual maupun kelompok.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan sebuah kondisi objektif di lapangan bersumber dari dokumen dokumen baik dari jurnal, penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dan buku. Selain peneliti, dalam penelitian ini mengambil data-data pendukung dari media online seperti *website* resmi lembaga atau badan situs pemerintah dan situs berita harian atau artikel.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan agar sebuah data yang diperoleh dapat dipastikan kebenarannya dan validasinya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknis seperti berikut:

1. Wawancara

Wawancara meneurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 2018) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi maupun ide melalui sebuah kegiatan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti mendapatkan informasi yang akurat terkait implementasi kebijakan transportasi BisKita Trans Pakuan Bogor, dengan informan sebagai berikut:

1. Bidang Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Bogor.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Angkutan Transportasi Jabodetabek.

3. Masyarakat Kota Bogor yang turut menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.

2. Observasi

Observasi (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 2018) merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, melainkan juga terhadap objek-objek alam lain. Untuk mendapatkan data pendukung, peneliti melakukan observasi secara langsung yakni dengan menaiki Biskita Transpakuan dari setiap koridor, kemudian melakukan observasi ke kantor Pemerintah Kota Bogor yang terkait untuk mengetahui apakah implementasi program BTS berjalan dengan sesuai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi (Sugiyono, PENGEMBANGAN PENYUSUNAN ANGGARAN PERSEDIAAN PADA USAHA , 2018) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, dan gambar, termasuk laporan serta keterangan yang bisa mendukung penelitian. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menambahkan dokumentasi yang akan memberikan informasi untuk proses penelitian.

1.9. Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang berupa kumpulan kata-kata, bisa dikumpulkan dengan berbagai macam teknik, seperti observasi, wawancara, intisari dokumen dan rekaman. Menurut Miles dan Huberman (Huberman, 1992), dalam kegiatan analisis data terdapat tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik yaitu:

1.9.1. Reduksi data

Reduksi data bertujuan untuk mengelompokkan, mengarahkan dan memilih data yang diperlukan, mengatur data empirik yang diperlukan. Proses tersebut dilakukan secara berkala hingga proses penelitian dan laporan hasil penelitian selesai. Informasi dan data yang dikumpulkan oleh peneliti diperlukan sebagai bahan penelitian dan membantu peneliti untuk menentukan pertanyaan dan responden yang dijadikan sebagai informan.

1.9.2. Penyajian data

Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memberikan gambaran dari penelitian secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti mengkaji dan menggali informasi mengenai

bagaimana proses implementasi kebijakan transportasi Biskita Pakuan.

1.9.3. Penarikan kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan atau verifikasi, peneliti menyimpulkan secara umum terkait dengan temuan yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Dibantu dengan teknik reduksi dan penyajian data, peneliti dapat menarik kesimpulan dari temuan yang ditemukan saat proses penelitian berlangsung.

1.10. Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian validitas dan kredibilitas data kualitatif merupakan bentuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Sugiyono, 2015). Teknik triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data perolehan dengan cara memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikonfirmasi dan dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Dengan menggunakan metode triangulasi ini, diharapkan dapat diperoleh data dengan sajian yang valid terkait implementasi kebijakan BisKita Trans Pakuan Bogor 2022-2023.